DOKUMEN TIDAK DIPERSYARATKAN

PERNYATAAN PPID UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Terhadap pertanyaan kuesioner Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mengenai:

Aspek Barang dan Jasa

II dan III Mengumumkan Dokumen Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur)

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025, terdapat beberapa dokumen yang sama sekali tidak dipersyaratkan pada beberapa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan			
II. Po	II. Pengumuman Informasi Tahap Pemilihan				
8.	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			
13.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			
III. Pengumuman Tahap Pelaksanaan					
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa			

5.	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak dipersyaratkan dalam
		pengadaan barang dan
		jasa
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Dokumen ini tidak
		dipersyaratkan dalam
		pengadaan barang dan
		jasa

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Jakarta, September 2025
PPID Utama,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Haryo Limanseto

PERNYATAAN PPID UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Terhadap pertanyaan kuesioner Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 mengenai:

Aspek Barang dan Jasa

II dan III Mengumumkan Dokumen Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

(Pengadaan Jasa Lainnya – Nonkompetisi Sewa Ruang Kantor untuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP))

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025, terdapat beberapa dokumen yang sama sekali tidak dipersyaratkan pada beberapa pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan			
II. P	engumuman Informasi Tahap Pemilihan				
8.	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	Dokumen ini tidak			
		dipersyaratkan dalam			
		pengadaan barang dan			
		jasa			
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan	Dokumen ini tidak			
		dipersyaratkan dalam			
		pengadaan barang dan			
		jasa			
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen	Dokumen ini tidak			
	Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai	dipersyaratkan dalam			
	Dampak Lingkungan	pengadaan barang dan			
40		jasa			
13.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari	Dokumen ini tidak			
	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	dipersyaratkan dalam			
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	pengadaan barang dan			
14.	Porito Agera Domhorian Donigleson	jasa Dokumen ini tidak			
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan	dipersyaratkan dalam			
		pengadaan barang dan			
		jasa			
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	Dokumen ini tidak			
10.	Doma / toura canggan dan canggan banding	dipersyaratkan dalam			
		pengadaan barang dan			
		iasa			
III. P	III. Pengumuman Tahap Pelaksanaan				
4.	Surat Jaminan Pelaksanaan	Dokumen ini tidak			
		dipersyaratkan dalam			
		pengadaan barang dan			
		jasa			

5.	Surat Jaminan Uang Muka	Dokumen ini tidak
		dipersyaratkan dalam
		pengadaan barang dan
		jasa
6.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Dokumen ini tidak
		dipersyaratkan dalam
		pengadaan barang dan
		jasa

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Jakarta, September 2025 PPID Utama,

Kementerian Koordinator

oordinator Bidang

Perekonomian

Haryo Li<mark>m</mark>anseto